

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar, M. Khoirul dan Vina Selviana, 2006, *Perilaku Partai Politik*, UM Press, Malang.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta
- , 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Azed, Abdul Bari, 2000, *Sistem-sistem Pemilihan Umum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Effendy, Mohammad, 2021, *Hukum Kepemiluan dan Format Sistem Kepartaian*. Thema Publishing, Yogyakarta.
- Haris, Syamsudin, 1998, *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana.*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Irawan, Yulian Ardi, 2010, *Tempat-tempat Ibadah*, Multi Kreasi Satudelapan, Jakarta.
- Jurdi, Fajlurahman, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, Jakarta.
- Kartini, Dede Sri, 2019, *Dalam Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Perihal Penyelenggaraan Kampanye*, Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)
- Khairul, Fahmi, 2012, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2016, *Pemilihan Umum dalam Transisi Demokrasi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Kherid Nizar, 2021, *Evaluasi Sistem Pemilu di Indonesia 1955-2019*, Rayyana Komunikasindo Jakarta.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, 1998, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PSHTN-FHUI, Jakarta.

- Mashad, Dhurorudin, 1998, *Reformasi Sistem Pemilu dan Peran Saspol Abri*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Mayo, B., 1960, *An Introduction to Democratic Theory*, Oxford University Press, Newyork.
- M.Gaffar, Janedri, 2012, *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Nasution, Adnan Buyung, 2007, *Arus Pemikiran Konstitusionalisme; Tata Negara*, Kata Penerbit, Jakarta.
- Nugroho, A., 2018, *Kampanye Politik dalam Pemilu: Regulasi dan Implementasinya*, Pustaka Pemilu, Jakarta.
- Pahlevi, Indra, 2015, *Sistem Pemilu di Indonesia antara Proporsional dan Mayoritarian*, P3DI, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1987, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Harapan, Jakarta.
- R. Rose dan Mossawir. H, *Voting and Elections: A Functional Analysis*, dalam Rowland B.F. Pasaribu *Konsep-Konsep Politik*, Wordpress.
- Sardini, Nur Hidayat, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Fajar Media Press, Yogyakarta.
- Sari, Putri Indah, 2021, *Alat peraga kampanye sebagai media sosialisasi pada pemilihan Kepala Desa yang digunakan oleh Desa Silo Bonto Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan pada Tahun 2019*, Medan.
- Sarjiyati, dkk, 2023, *Penegakan Hukum Pemilu Perspektif Penguatan Demokrasi*, Deepublish, Yogyakarta.
- Surbakti, Ramlan, 2014, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widya Sarana, Jakarta.
- Sugiono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung.
- Soekanto, Soejono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Thaib, Dahlan, 2009, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, Total Media, Yogyakarta.
- Tricahyono, Ibnu, 2009, *Reformasi Pemilu: Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*, In-Trans Pub, Malang.

Utama, Argawati, 2013, *Tafsir MK Ihwal Pelanggaran Tempat Kampanye Pemilu*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI)

Wolhoff, G. J., 1960, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, Timun Mas, Jakarta.

B. Jurnal

Akhmaddhian, Suwari, Erga Yuhandra, Yani Andriyani, 2020, “Peran Masyarakat dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang Berkualitas”, *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, Vol. 1 (2). <https://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/1905>. Diakses pada 22 Januari 2025.

Antari, Putu Eva Ditayani, 2018, “Pemilihan Umum di Indonesia”, *Jurnal Panorama Hukum*, vol. 3 no. 1, 2018. <https://doi.org/10.21067/jph.v3i1.2359>. Diakses pada 20 Januari 2025.

Chrisdanty, Febry dan Diah Wahyulina, 2014, “Penanganan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD di Wilayah Kabupaten Kota”, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol.27(2).<https://download.garuda.kemdikbud.go.id/437458&val=8691&title/>. Diakses pada 30 September 2024.

Damanik, Syabrina Yolanda Chansa dan Khalid, 2023, “Pelanggaran Hukum terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye Sembarangan dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Medan”, *UNES LAW REVIEW*, Vol. 6 (2). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1644>. Diakses pada 30 Oktober 2024.

Fahmi, Khairul, 2015, “Sistem Penanganan Pelanggaran Pemilu”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.12(2).<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1224>. Diakses pada 30 Oktober 2024.

Fatayati, Sun, 2017, “Relevansi Asas-asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas”, *Jurnal Tribakti*, Vol. 28 (1). <https://doi.org/10.33367/tribakti.v28i1472>. Diakses pada 15 Januari 2025.

Fatimah, Siti, 2018, “Kampanye Sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu”, *Jurnal Resolusi*, Vol. 1 (1). <https://doi.org/10.33559/esr.v1i2229>. Diakses pada 10 Oktober 2024

Handrawan, Sabrina Hidayat, Ali Rizky dan La Ode Muhammad Sulihin, 2024, “Penegakan Hukum Pidana oleh Bawaslu atas Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kota Kendari”, *Delarev*, Vol. 3 (1). <https://doi.org/1047353/delarev.v3i1.69>. Diakses pada 29 September 2024.

Kansil, Christine S.T dan Louis Sebastian Anot Putra, 2023, “Persoalan Peralihan Sistem Pemilu Indonesia menjadi Sistem Proporsional Tertutup menurut Permohonan MK Nomor 114/PUU-XX/2022”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol.7(1).<https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/5021>. Diakses pada 28 Oktober 2024.

Katarina, Theresia dan Annisa Fitria, 2022, “Penyalahgunaan Tempat Ibadah yang digunakan Sebagai Sarana Kampanye Pemilihan Umum”, *JCA OF LAW*, Vol. 3 (1). <https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/376>. Diakses pada 29 Oktober 2024.

Kilapong, Christo Samuel, 2020, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017”, *LEX CRIMEN*, Vol. IX (3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/29856>. Diakses pada 15 Januari 2025.

Kusumo, Wisnu Dani, 2015, “Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Legislatif”, *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/9246>. Diakses pada 30 September 2024.

Latifah, Luluk, Iskandar Ritonga, Lutfi Agus Salim dan Fatkur Huda, 2023, “Analisa Potensi tempat Ibadah untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”, *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, Vol. 6 (2). <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1183>. Diakses pada 30 September 2024.

Paramita, Nurlia Dian, 2020, “Mewujudkan Kampanye Deliberatif Dalam Sistem Pilkada Serentak 2024 Di Indonesia”, *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, Vol. 2 (2). <https://ejurnal.kepri.bawaslu.go.id/uplod/cover-jurnal/1629040389384>. Diakses pada 20 Januari 2025.

R. Rose dan Mossawir. H, “Voting and Elections: A Functional Analysis dalam Rowland B.F Pasaribu Konsep-Konsep Politik”, *Wordpress*.

Sari, Putri Indah, 2021, *Alat Peraga Kampanye sebagai Media Sosialisasi pada Pemilihan Umum Kepala Desa yang digunakan oleh Desa SiloBonto Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan pada Tahun 2019*.

C. Peraturan dan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang *Pemilihan Umum*.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, tentang *Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*.

Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang *Kampanye Pemilihan Umum*.

Republik Indonesia, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Nomor 14 tahun 2012 tentang *Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*.

Republik Indonesia, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum, SK Nomor 175/PL.01.5 Kpt/31/Prov/IX/2018 tentang *Aturan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye*.

Republik Indonesia, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum, SK Nomor 176/PL.01.5-Kpt/31/Prov/IX/2018 tentang *Aturan Fasilitas Alat Peraga Kampanye*.